

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sisi ekonomi maupun sisi sosial. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin supaya angkatan kerja yang berada di dalam suatu negara tersebut dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi di negara tersebut. Di lain sisi tujuan dari pembangunan ekonomi ialah terciptanya pertumbuhan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) (Muslim, 2014). Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah juga akan semakin meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peningkatan

pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan infrastuktur yang ada, dan peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat, maka peningkatan pembangunan perekonomian daerah dapat diukur dengan cara kuantitatif (Ristanti, 2015). Dalam prosesnya pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan sebagai alat analisis dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, hal tersebut guna menarik rumusan kebijakan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah acuan untuk mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah (Cahyono, 2017).

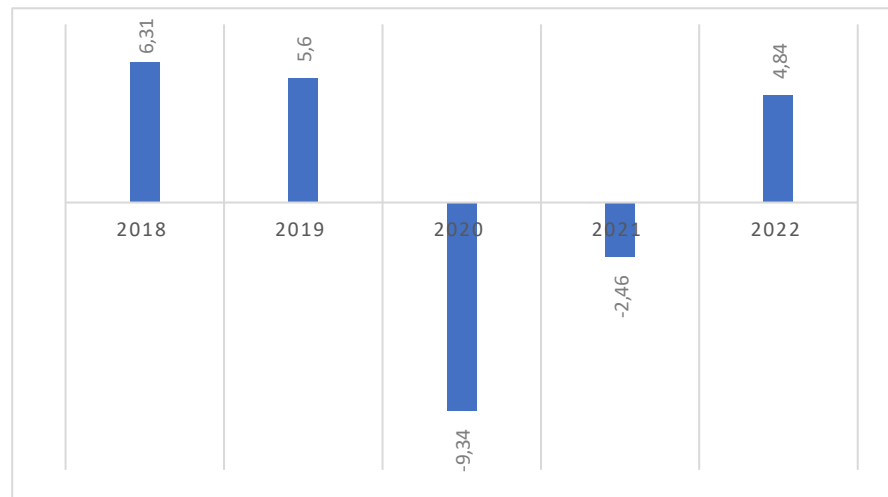
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru , alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Siwi, 2017). Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dari para pemangku kepentingan dipastikan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam ketimpangan alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah. Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin urgen dan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi pada suatu wilayah (Djadjuli, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi (Badri, 2015). Pertumbuhan Ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator Pertumbuhan Ekonomi tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan Pendapatan bagi masyarakat (Miswar et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Kusumawati & Gusti, 2018).

Pertumbuhan ekonomi nasional era *Covid-19* yang sempat berkontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020, berhasil bangkit menjadi 3,69% pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan ritme yang lebih lambat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Bali yang sangat besar terhadap sektor

pariwisata, yang paling terdampak oleh pembatasan mobilitas selama pandemi.

Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi provinsi Bali tahun 2018-2022 tersaji dalam sebuah gambar 1.1 dibawah ini :



*Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), diolah.*

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2018-2022 (%)**

Fluktuasi ekonomi provinsi Bali kembali terjadi pada tahun 2019 dimana angka pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,71 persen hal ini terjadi karena masuknya wabah penyakit *corona virus* yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya menekan angka penularan wabah Covid-19, kebijakan tersebut secara tidak langsung membatasi mobilitas wisatawan domestik maupun internasional. Pandemi ini berlangsung sampai tahun 2022, semakin menyebarnya wabah *virus corona* maka kebijakan protokol kesehatan yang diambil pemerintah Provinsi Bali pada saat itu pun semakin ketat, sektor pariwisata yang selama ini menjadi punggung perekonomian provinsi Bali mengalami kontraksi yang sangat

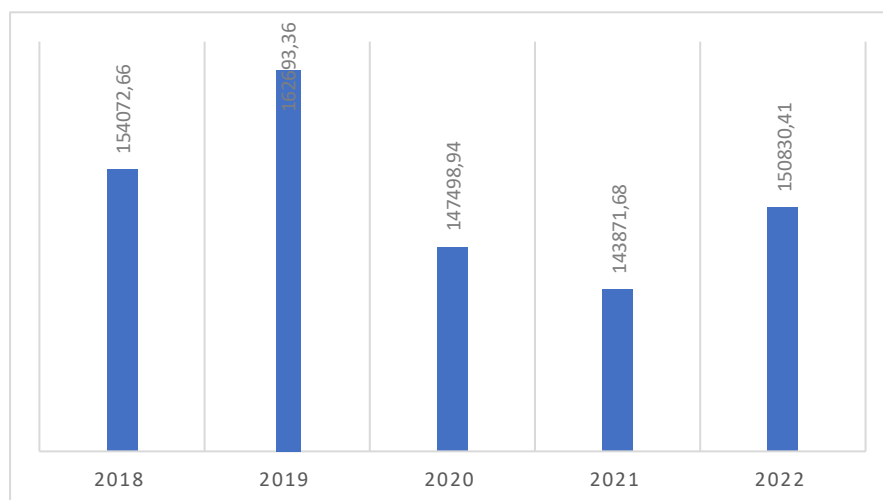
dalam dampaknya laju pertumbuhan ekonomi provinsi Bali mencatat angka negatif yaitu -9,34% yang mana angka penurunan ini belum pernah terjadi pada periode sebelumnya dan menjadi angka fluktuasi terburuk sepanjang sejarah pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan PDRB. PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan (Rori et al., 2016). Pertumbuhan ekonomi regional dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di suatu wilayah. Peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) menjadi salah satu patokan dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB yang merupakan ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan output suatu daerah agar pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat meningkat juga.

Provinsi Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam nya dan secara internasional diakui destinasi wisata unggulan nya. Dengan luas wilayah sekitar 5.780 km<sup>2</sup> dan populasi yang terus

berkembang, Bali memiliki daya tarik utama berupa alam, budaya, dan tradisi yang unik. Bali dikenal sebagai "Pulau Dewata" dengan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian. Sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bali. Namun, ketergantungan yang tinggi pada pariwisata membuat Bali sangat rentan terhadap berbagai gangguan eksternal, seperti bencana alam dan krisis global.

Berikut merupakan gambaran perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan provinsi Bali selama tahun 2018-2022 tersaji dalam sebuah gambar 1.2 dibawah ini :



*Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), diolah.*

**Gambar 1. 2 PDRB ADHK Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Bali tercatat bahwa perubahan nilai riil Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan provinsi Bali selama periode 2010 hingga 2022, kerap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, nilai PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 144,93 milyar perubahan nilai riil PDRB ini terhitung turun sebesar 0,77% dari tahun sebelumnya, penurunan ini

dipicu oleh erupsi Gunung Agung yang terjadi pada akhir tahun 2017. Bencana alam yang terjadi tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lokal tetapi juga berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Pembatalan perjalanan wisatawan domestik dan internasional, gangguan transportasi udara, serta penutupan sementara destinasi wisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali melambat tahun 2016 ke tahun 2017. Dalam menghadapi tantangan ini pemerintah provinsi Bali sangat sigap untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengembalikan angka pertumbuhan yang berlanjut kembali stabil pada tahun selanjutnya.

Namun terlihat pada gambar 1.2 fluktuasi ekonomi provinsi Bali kembali terjadi pada tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 154,1 milyar meningkat dari Rp 144,93 milyar pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi tahunan yang signifikan, dan menggambarkan aktivitas produksi dan konsumsi di Bali berlangsung secara intensif. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019 dimana nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 162,69 milyar. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Pada periode ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Sektor pariwisata yang kembali stabil mendorong geliat ekonomi diberbagai sektor lainnya, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, serta sektor jasa lainnya. Dampak berantai dari meningkatnya aktivitas wisata memberikan kontribusi

langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut mencerminkan pertumbuhan ekonomi provinsi Bali yang konsisten dan stabil. Namun, kondisi tersebut berubah drastis pada tahun 2020 penurunan tajam pada nilai PDRB ADHK tahun 2020 menjadi Rp 147,49 milyar hal ini terjadi karena masuknya wabah penyakit *Corona virus* yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial sebagai upaya menekan angka penularan wabah *Covid-19*, kebijakan tersebut secara tidak langsung membatasi mobilitas wisatawan domestik maupun internasional. Penurunan angka PDRB ini berlanjut pada tahun berikutnya dimana pada tahun 2021 PDRB hanya tercatat sebesar Rp 143,87 milyar. Ini disebabkan semakin menyebarnya wabah virus corona maka kebijakan protokol kesehatan yang diambil pemerintah Provinsi Bali pada saat itu pun semakin ketat, sektor pariwisata yang selama ini menjadi punggung perekonomian provinsi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terlihat adanya pemulihan ekonomi dengan kenaikan PDRB ADHK menjadi Rp 150,83 milyar. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya tekanan eksternal yang signifikan terhadap perekonomian Bali.

Keindahan alam dan destinasi wisata yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian di provinsi Bali membuat masyarakat terlalu bergantung pada sektor pariwisata dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini juga menjadi penyebab laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali rentan akan guncangan eksternal, dalam

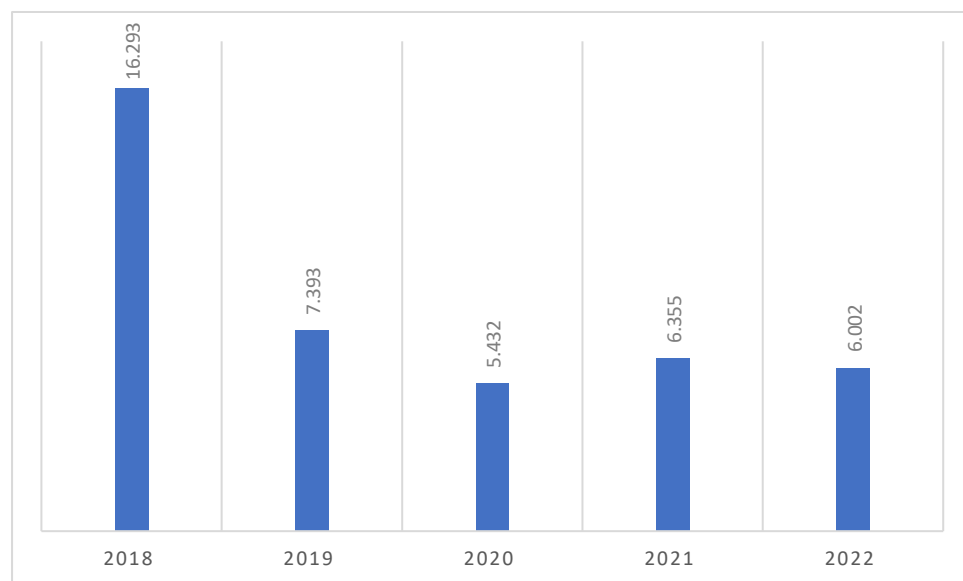


menghadapi hal tersebut Bali perlu menciptakan strategi adaptasi yang lebih baik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Penyebab turunnya angka pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang merupakan salah satu instrumen investasi. Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu menjelaskan bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran, investasi juga merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Jadi, dapat dikatakan investasi merupakan suatu persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi (Hariwijaya, 2020).

Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu mendorong perekonomian suatu daerah. Investasi bisa berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, memperluas usaha atau menambah kapasitas serta menambah jumlah aktivitas barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja serta menambah peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan berdirinya perindustrian di kawasan Jawa Timur dan disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja baik terdidik, tenaga kerja terlatih maupun tenaga kerja kasar. Sehingga investasi akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita penduduk daerah. Pertumbuhan pendapatan perkapita menjadikan masyarakat tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja, namun kebutuhan sekunder maupun tersier dapat dipenuhi. Hal inilah yang akan memicu berkembangnya berbagai aktivitas perekonomian di daerah (Cahyono, 2017).

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (PMDN UU). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan salah satu instrumen penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai daerah dengan destinasi wisata yang sudah mendunia, tentunya Bali menjadi tujuan bagi investor domestik untuk menanamkan modal nya di berbagai sektor ekonomi terutama sektor pariwisata, perdagangan, infrastruktur, dan properti. Berikut merupakan realisasi PMDN di Provinsi Bali tahun 2018-2022 :



*Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), diolah.*

**Gambar 1. 3 PMDN Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

Gambar 1.3 didapat dari hasil laporan tahunan atau publikasi resmi terkait penanaman modal dalam negeri di provinsi Bali yang dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada penanaman modal dalam negeri di provinsi Bali, terlihat pada

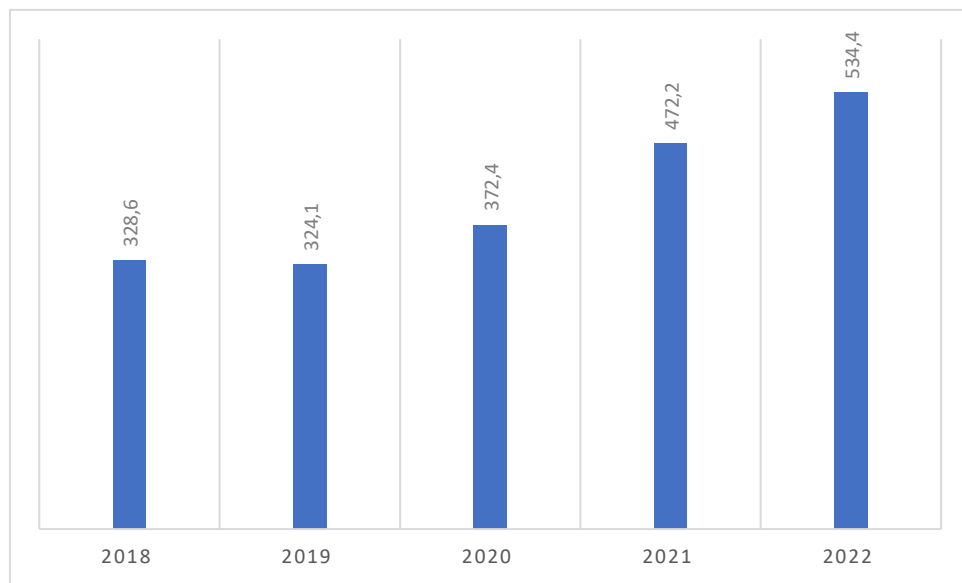
tahun 2018, realisasi PMDN mencapai angka tertinggi sebesar Rp 16,2 Milyar. Namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan tajam menjadi Rp 7,3 Milyar, karena diduga tahun tersebut menjadi awal periode pandemi. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2020, dengan nilai PMDN hanya sebesar Rp 5,4 Milyar. Penurunan ini kuat penyebabnya akibat dari pandemi *COVID-19* yang berdampak pada lumpuhnya berbagai sektor usaha di provinsi Bali, terutama sektor pariwisata yang dijadikan sebagai sektor unggulan. Meskipun demikian, pada tahun 2021 terjadi sedikit pemulihan dengan realisasi PMDN yang naik menjadi Rp 6,3 Milyar, sebelum kembali turun menjadi Rp 6,002 Milyar pada tahun 2022. Dalam data

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang tersaji fluktuasi ini tidak terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke belakang saja, namun pada tahun-tahun sebelum masa pandemi pun fluktuasi rentan terjadi seperti terlihat pada tahun 2014 total realisasi PMDN hanya sebesar Rp 3,8 Milyar sedangkan pada tahun 2015 total realisasi PMDN mencapai Rp 7,7 Milyar. Fenomena ini terjadi akibat ketidak pastian politik jelang pemilihan presiden pada tahun 2014. Realisasi PMDN kembali turun pada tahun 2016 dan 2017 ini di akibatkan oleh bencana alam yaitu erupsi gunung Agung, aktivitas vulkanik yang terjadi berakibat pada penurunan daya tarik investor sehingga banyak proyek investasi yang mengalami penundaan hingga pembatalan.

Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali perlu adanya peran dari perdagangan internasional. Salah satu instrumen perdagangan internasional yang tidak bisa lepas adalah neraca perdagangan, karena kegiatan perdagangan internasional dicatat dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan neraca berjalan yang menghitung ekspor bersih, selisih antara ekspor

dan impor suatu perekonomian selama periode waktu tertentu dalam setahun yang di ukur dengan menggunakan mata uang yang sah (Savitri, 2024).

Sebagai salah satu daerah dengan komoditas unggulan kerajinan, pakaian dan hasil pertanian maka ekspor menjadi sumber pendapatan utama bagi Bali dan impor juga memainkan peran dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan juga konsumsi masyarakat lokal. Kegiatan ekspor dan impor merupakan komponen penting dalam neraca perdagangan daerah yang dapat mencerminkan perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu wilayah. Neraca yang surplus menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan luar negeri, sebaliknya ketika neraca perdagangan defisit maka terjadi ketergantungan masyarakat lokal terhadap aktivitas impor. Hal ini berarti ketika ekspor meningkat maka akan memberi nilai tambah pada pendapatan daerah tersebut yang tentunya akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, begitupun sebaliknya jika nilai impor tinggi maka angka konsumsi masyarakat setempat akan tinggi yang akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi daerah. Neraca perdagangan menyediakan informasi tentang ulasan dari performa perekonomian suatu negara dan juga pola perdagangan sebagaimana tergambarkan dalam perdagangan barangnya (Tomayahu Anisa, 2021).



*Sumber : Badan Pusat statistik (BPS), diolah.*

**Gambar 1. 4 Neraca Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Juta USD)**

Pada gambar 1.4 didapat informasi bahwa neraca perdagangan di provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada puncak tahun 2017 realisasi neraca perdagangan yang didapat mencapai 412.116.860 USD, angka tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 yang tercatat hanya mencapai 328.601.913 USD dan pada tahun 2019 berada pada angka 324.121.206 USD. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor permintaan global terhadap produk unggulan daerah. Namun menariknya pada era Covid-19 di tahun 2020 angka realisasi neraca perdagangan justru mengalami peningkatan menjadi 372.490.230 USD, meskipun sektor pariwisata sedang mengalami kontraksi realisasi neraca perdagangan pada masa covid-19 dan pasca pandemi tercatat lebih stabil dan terus mengalami peningkatan, dengan nilai neraca perdagangan 472.253.512 USD pada tahun 2021 dan 534.277.689 USD pada tahun 2022. Fenomena ini terjadi karena adanya penurunan pada volume impor, pembatasan

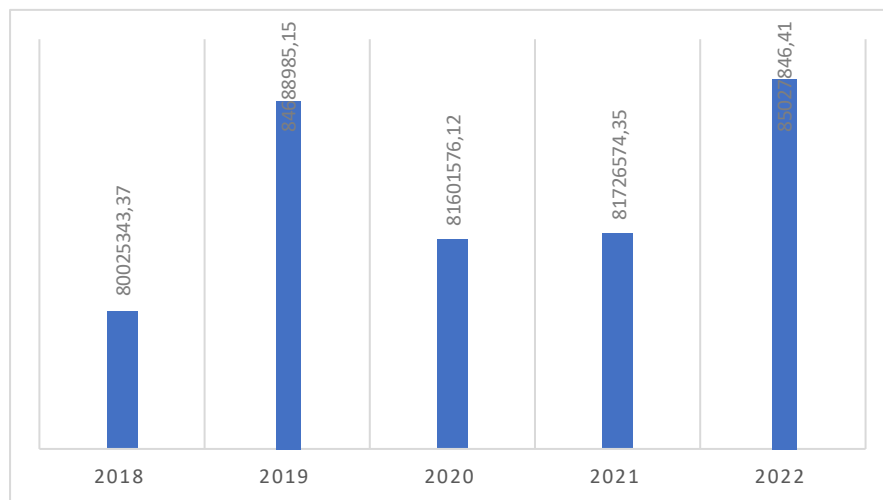
aktivitas ekonomi yang diterapkan pada masa pandemi membuat masyarakat terbatas dalam mengkonsumsi barang-barang impor, hal ini tentunya dapat menekan nilai neraca perdagangan provinsi Bali.

Selain itu, faktor lain yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah angka pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dalam konteks ekonomi regional berperan sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencakup pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi permintaan agregat. Seperti yang dinyatakan oleh Cass Alexander, dkk dalam penelitiannya bahwa konsumsi rumah tangga merupakan elemen yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak alasan yang menyatakan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam (Rasnino dkk., 2022a).

Konsumsi rumah tangga adalah salah satu indikator penting dalam mengukur stabilitas ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang dapat menjadi pendorong penting dalam kegiatan perekonomian. Jika daya beli masyarakat tinggi, maka tingkat konsumsi akan barang dan jasa di daerah tersebut akan meningkat yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun sebaliknya, ketika terjadi penurunan konsumsi maka dapat mengindikasikan melemahnya perekonomian sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat terlihat pada peningkatan output perkapita sekaligus memberikan dampak pilihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang

diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Ngarifun & Hartono, 2022). Konsumsi rumah tangga yang meningkat akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa di daerah tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halil Haqizul Putra yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi baik barang atau jasa oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara meningkat sehingga mempengaruhi akan permintaan barang dan jasa kemudian akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksinya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Putra A' dkk., 2022a). Pendapatan masyarakat middle-class pada konsumsi makanan dapat mempengaruhi kemampuan sebuah perekonomian untuk tumbuh lebih cepat (Ristianarko, 2021). Maksudnya, pendapatan masyarakat yang disertai dengan pola konsumsi yang sehat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan aktivitas konsumsi mampu menciptakan peluang bagi peningkatan produksi dan distribusi barang serta jasa, sehingga memperkuat dinamika perekonomian. Ketika konsumsi meningkat, aktivitas ekonomi pun bergerak lebih aktif, mendorong pertumbuhan yang lebih optimal. Oleh karena itu, konsumsi menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



**Sumber :** Badan Pusat statistik (BPS), diolah.

**Gambar 1. 5 Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Bali  
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 dan data yang tersaji di BPS dapat diketahui bahwa selama periode 2010 hingga 2019 konsumsi rumah tangga di provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tercermin pada daya beli masyarakat yang meningkat yang didukung oleh sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian provinsi Bali. Hanya saja, setelah pandemi mulai mewabah di pulau ini, daya beli masyarakat pun menurun hal ini disebabkan oleh kurangnya pendapatan masyarakat karena keterbatasan aktivitas ekonomi sebagaimana kebijakan yang diterapkan pada masa covid-19, tentunya hal tersebut berdampak pada berkurangnya angka konsumsi pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka Rp.81,6 juta rupiah. Meskipun sempat menurun, pada tahun 2021 angka konsumsi rumah tangga di Bali mulai menunjukkan pemulihan, dengan diterapkan nya kebijakan-kebijakan pasca pandemi membuat aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali meskipun belum bisa efektif seperti sebelum adanya pandemi.

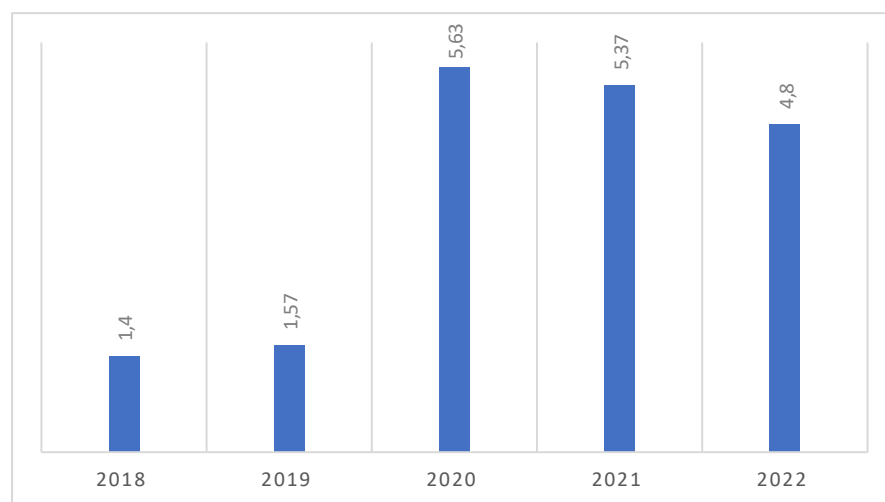


konsumsi rumah tangga di Bali pada tahun 2021 kembali menginjak Rp. 81,7 juta rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 85,02 juta rupiah pada tahun 2022. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kembali bangkit memulihkan perekonomian dari masa pandemi, dan ini merupakan salah satu tren dari upaya Bali dalam beradaptasi dengan keadaan pasca pandemi.

Permasalahan krusial selanjutnya dalam pembangunan ekonomi yang masih dihadapi adalah tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta (Ishak, 2018). Tingginya angka pengangguran disebabkan banyaknya permintaan perusahaan atau lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka para pencari pekerja, banyaknya perusahaan yang mencari lulusan diploma ataupun sarjana (Ardian et al., 2022).

Meskipun Bali dikenal sebagai daerah dengan sektor pariwisata yang dominan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tidak semua pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif atau menciptakan lapangan kerja secara luas bagi penduduknya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang

termasuk dalam pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya tingkat pengangguran di Provinsi Bali tahun 2010-2022 terlihat pada gambar 1.6 berikut ini :



**Sumber :** Badan Pusat statistik (BPS), diolah.

**Gambar 1. 6 TPT Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (%)**

Pengangguran yang tinggi dapat menjadi beban sosial dan ekonomi, serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketika sebagian besar angkatan kerja tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan produksi, maka potensi ekonomi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini diperburuk dengan kondisi ketimpangan keterampilan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di beberapa wilayah Bali, yang menyebabkan terjadinya mismatch antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,40 persen dan meningkat menjadi 1,57 persen pada tahun 2019. Meskipun peningkatannya relatif kecil, kondisi ini terjadi di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang masih stabil. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pada TPT menjadi 5,63 persen. Kenaikan ini bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang secara drastis memukul sektor pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian Bali, sehingga berdampak signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2021, TPT sedikit menurun menjadi 5,37 persen, menandakan adanya awal pemulihan ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi masih dalam fase pemulihan yang cukup lambat. Sementara itu, pada tahun 2022, TPT kembali menurun menjadi 4,80 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi, termasuk kembalinya sebagian besar sektor pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ke jalur produktif.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan erat antara laju pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi tingkat pengangguran. Ketika perekonomian mengalami kontraksi seperti pada tahun 2020, tingkat pengangguran melonjak tajam. Sebaliknya, ketika ekonomi mulai pulih, penyerapan tenaga kerja meningkat dan angka pengangguran menurun. Oleh karena itu, memahami pola hubungan ini menjadi penting dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terutama dalam memperkuat daya tahan sektor ketenagakerjaan terhadap guncangan ekonomi. Menurut teori Keynesian, pengangguran yang terjadi akibat kurangnya permintaan agregat perlu ditangani melalui peningkatan investasi

dan konsumsi, serta penguatan sektor perdagangan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pengangguran dijadikan salah satu variabel independen untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, berdampingan dengan variabel penanaman modal dalam negeri, neraca perdagangan, dan konsumsi rumah tangga.

Berbagai studi telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti penanaman modal, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan. Namun demikian, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten dan cenderung berbeda-beda antar wilayah maupun waktu. Misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa PMDN memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun studi lain menemukan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Demikian pula, neraca perdagangan di beberapa daerah mendukung pertumbuhan ekonomi ketika dalam posisi surplus, namun di daerah seperti Bali yang struktur ekspornya terbatas, pengaruh neraca perdagangan bisa berbeda.

Konsumsi rumah tangga secara umum memang diakui sebagai komponen terbesar dalam PDRB, namun kontribusinya juga beragam tergantung pola konsumsi masyarakat di masing-masing daerah. Sementara itu, di Provinsi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata yang padat karya, peningkatan angka pengangguran akibat gangguan eksternal seperti pandemi telah terbukti memperlambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, pengangguran layak dimasukkan sebagai variabel independen karena secara teoritis dan empiris berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara simultan menguji pengaruh PMDN, neraca perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Bali. Penelitian ini juga menekankan pada analisis jangka panjang menggunakan data time series tahun 2010–2022, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual terhadap dinamika ekonomi di Bali yang unik, terbuka, dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti pariwisata dan mobilitas global. *lanjutan.*

Dari fenomena dan permasalahan diatas serta keterkaitan yang ada diantara fenomena nya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2010-2022”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Bagaimana PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengangguran di Provinsi Bali tahun 2010-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengangguran secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2010-2022 ?

3. Bagaimana pengaruh PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengangguran secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2010-2022 ?
4. Bagaimana elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran di Provinsi Bali tahun 2010-2022.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2010-2022.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2010-2022.
4. Mengetahui Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap PMDN, Neraca Perdagangan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pengangguran di Provinsi Bali tahun 2010-2022

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan mengambil data dari website resmi Badan Pusat Statistik. Website tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai perekonomian Provinsi Bali.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Dalam merangkai skripsi ini, penulis menyusun jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan seluruh tahapan penelitian. Jadwal disusun

